

Kinerja Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten Aceh Tengah

Hajar Ashwad^{*1}, Finta Kuhini²

^{1,2} Universitas Gajah Putih, Indonesia

hajarashwad@gmail.com, fintakuhini29@gmail.com

Alamat: Jl. Blangbebangka Sp Lukub Badak Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah

Korespondensi penulis: hajarashwad@gmail.com

Abstract. Aceh Reintegration Boards based in the city of Banda Aceh and the extension of subordination at the district level is carried out by the Aceh Reintegration Agency implementing unit (SATPEL-BRA) in accordance with what is stated in Aceh Qanun Number 6 of 2015 concerning the Aceh Reintegration Agency article 1 number 15 which reads Reintegration Agency Implementing Unit Aceh Regency/City, hereinafter referred to as the BRA Regency/City Unit. The aim of this research is to find out the performance of SATPEL-BRA in Kab. Aceh is currently carrying out its main duties and functions in maintaining peace in Aceh, especially in the District. Central Aceh, the method used is descriptive qualitative by describing it in a detailed manner and data collection is carried out by in-depth interviews. The results of this research regarding the fulfillment of rights and the touch of programs have apparently not been effective enough, although various efforts have been made to improve the welfare of GAM combatants, political prisoners and political prisoners, but they have not been effective enough in terms of fulfilling justice for victims affected by the Aceh conflict, for example there are still cases Conflict victims still do not receive assistance from BRA, this is due to factors and obstacles such as limited budgets which hinder the optimal implementation of programs and activities. Lack of coordination between various related parties, both internal and external, causes inefficiency in carrying out tasks. Resistance from several parties to proposed changes or new innovations can hinder development and performance improvement. The policies taken by the central and regional governments greatly influence BRA's performance because the budget for the District Implementation Unit. Cities depend on whether or not there is a budget provided by the local government.

Keywords: Aceh Reintegration Board, Implementation Unit, Program Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh, Program

Abstrak. Badan Reintegrasi Aceh berkedudukan di Kota Banda Aceh subordinasi pada tingkat kabupaten dilakukan oleh satuan pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (SATPEL-BRA) sesuai dengan yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Aceh Badan Reintegrasi pasal 1 angka 15 yang berbunyi Unit Pelaksana Badan Reintegrasi Kabupaten/Kota Aceh, selanjutnya disebut Unit BRA Kabupaten/Kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja SATPEL-BRA di Kab. Aceh Tengah saat ini menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga perdamaian di Aceh, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara menguraikannya secara rinci dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian mengenai pemenuhan hak dan sentuhan program ternyata belum cukup efektif, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kombatan, tapol, dan tapol GAM, namun belum cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan kombatan, tapol, dan tapol GAM. dalam hal pemenuhan keadilan bagi korban konflik aceh, , hal ini disebabkan oleh faktor dan kendala seperti keterbatasan anggaran sehingga menghambat optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Kurangnya koordinasi antar berbagai pihak terkait baik internal maupun eksternal menyebabkan terjadinya ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas. Penolakan beberapa pihak terhadap usulan perubahan atau inovasi baru dapat menghambat pembangunan dan peningkatan kinerja. Kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah sangat mempengaruhi kinerja BRA karena anggaran untuk Unit Pelaksana Kabupaten/Kota bergantung pada ada atau tidaknya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Kata kunci: Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh, Program

1. LATAR BELAKANG

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Republik Indonesia Reintegrasi sangat membutuhkan peran suatu lembaga untuk menangani terjadinya proses reintegrasi. Sebagaimana tercantum dalam MoU Helsinki, dalam poin 3.2.3 “Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka kedalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak.

Dalam rangka pemenuhan butir-butir MoU serta menjaga perdamaian Aceh yang abadi, maka dibentuklah lembaga Badan Reintegrasi Aceh berpusat di kota banda aceh dan perpanjangan subordinasi di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh satuan pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (SATPEL-BRA) sesuai yang termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh pasal 1 angka 15 yang berbunyi Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Satpel BRA Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan program Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian Aceh yang berdasarkan : keislaman, kemanusiaan, keadilan, Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan; Keseimbangan, Keselarasan, dan Keserasian; Ketertiban dan Kepastian Hukum; Kebersamaan ;dibentuklah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang bertujuan untuk perberdayaan ekonomi bagi kelompok korban konflik dan untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terlibat dalam konflik. Berdasarkan pengamatan sementara ternyata masih ada butir MoU yang belum dituntaskan seperti Pembagian Lahan Tanah untuk Masyarakat korban konflik, Mantan Eks Kombatan dan Narapidana Politik/Tahanan Politik di wilayah Kab. Aceh Tengah, dan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut. Berdasarkan hal di atas peneliti ingin lebih mengetahui tentang peranan SATPEL B.R.A Aceh Tengah.

2. KAJIAN TEORITIS

Kinerja bersasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Cardy (*James dan Nelson, 2009: 195*) mengatakan, performance management is process of defining, measuring, appraising, providing feedback on, and improving performance. Dari pengertian ini dapat diuraikan bahwa mengelola kinerja sebaiknya dilakukan secara kolaboratif

dan kooperatif antara pegawai, pemimpin, dan organisasi, melalui pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka kerja atas tujuan-tujuan terencana, standar dan kompetensi yang disetujui bersama. Manajemen kinerja bersifat menyeluruh dan menjamah semua elemen, unsur atau input yang harus didayagunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil individu dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi, serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Gibson mendefinisikan kinerja (performance) sebagai '... is considered to be a multiplicative function of motivation (the force) and ability.' Kinerja juga diartikan sebagai suatu pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Kinerja adalah catatan mengenai akibat-akibat yang dihasilkan pada fungsi pekerjaan atau aktifitas selama periode tertentu yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Kinerja seseorang merupakan gabungan dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang dihasilkan. Oleh karena itu kinerja bukan menyangkut karakteristik pribadi yang ditunjukkan oleh seseorang melalui hasil kerja yang telah dan akan dilakukan seseorang. Berdasarkan pendapat Wirawan (2009:56) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. McGregor (2007: 28) berpendapat bahwa setiap karyawan mau bekerja giat sesuai dengan harapan. Daya penggerak yang memotivasi semangat kerja terkandung dari harapan yang akan diperolehnya. Jika harapan menjadi kenyataan maka karyawan cenderung akan meningkatkan kualitas kerjanya, begitu pula sebaliknya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber diantaranya : Ketua Satuan Pelaksana Badan Rintegrasi Kab. Aceh Tengah, 1 Orang, Bidang Perencanaan / program : 1 orang, dan 2 Staf SATPEL-BRA Kab. Aceh Tengah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Reintegrasi Aceh (singkatan: BRA) atau Badan Reintegrasi Damai Aceh adalah lembaga resmi pemerintah yang mengurus masalah reintegrasi dalam proses perdamaian di Aceh. Didirikan pada tanggal 15 Februari 2006 dengan SK Gubernur Aceh. BRA memiliki struktur di tingkat provinsi dan kabupaten. BRA juga memiliki perwakilan-perwakilan dari Pemerintah, GAM, masyarakat sipil dan cendekiawan. BRA juga bekerjasama erat dengan lembaga-lembaga donor internasional dalam merencanakan dan melaksanakan program-program reintegrasi pasca konflik.

Ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang BRA sebagaimana yang sudah ditetapkan bahwa BRA ini lahir sebagai bagian dari penyelesaian konflik di Aceh secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu bentuk penyelesaian konflik Aceh ini adalah dengan dibentuknya BRA.

Transformasi upaya BRA di dalam mengembalikan kombatan dan korban konflik lainnya ke dalam masyarakat sipil secara utuh dan tanpa ada stigmatisasi negatif. Di samping itu, BRA juga bisa dan memiliki tugas untuk mengubah agar bentuk memperjuangkan hak-hak warga masyarakat Aceh tidak harus dengan melakukan gerakan pemberontakan, ataupun tergabung dalam gerakan separatis. Namun, bisa dilakukan melalui langkah politik praktis. Hal ini sejalan dengan keterangan Elwin Sari selaku ketua bidang perencanaan dan program “bahwa mantan kombatan GAM yang mendeklarasikan partai politik lokal (Partai Aceh) sebagai transformasi perjuangan dari gerakan bersenjata ke perjuangan politik”. Dengan begitu, BRA ini hadir salah satunya untuk mewujudkan keadilan bagi para korban konflik, secara khusus kepada kombatan GAM, tapol, dan napol. Selama ini keadilan dan kewenangan pemerintahan yang selalu menjadi “Dasar Konflik” antara GAM dengan pemerintah RI. Kehadiran BRA disambut baik oleh masyarakat dan berlaku di tengah-tengah masyarakat Aceh dipandang cukup penting.

Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kab. aceh Tengah memiliki peran dan fungsi yang besar bagi pemenuhan keadilan bagi korban konflik. Secara prinsip fungsi BRA dalam Pasal 13 yaitu :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan perumusan kebijakan umum dalam bidang Penguatan Perdamaian Aceh,
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan Reintegrasi dan rekonsiliasi;
- c) Pengkoordinasian dan pelaksanaan perbaikan ekonomi;
- d) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemberdayaan dan bantuan sosial;

- e) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi kesehatan fisik, mental, dan psikososial;
- f) Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan;
- g) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemulihan hak sipil, hak politik hak ekonomi dan sosial budaya;
- h) Penglibatan masyarakat dalam mitigasi dan pencegahan konflik;
- i) Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pengarusutamaan perdamaian pada SK PA dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- j) Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan MoU Helsinki;
- k) Pengintegrasian dan sinkronisasi perdamaian dalam program pembangunan Aceh;

Secara praktis, fungsi BRA yang sudah dimanifestasikan secara baik dalam bidang dan lingkup reintegrasi kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) dan masyarakat imbas konflik. Upaya reintegrasi tersebut dimaksudkan untuk bisa mengurangi stigmatisasi sebagai orang yang pernah membelok dari pemerintah. Stigmatisasi tersebut dapat dihilangkan dan bisa membentuk tatanan kehidupan yang baru bagi tiga kelompok tersebut (kombatan, tapol/napol dan masyarakat imbas konflik) melalui upaya reintegrasi.

Menurut Rajali, selaku ketua Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Upaya untuk pemenuhan reintegrasi tersebut sering sekali terkendala karena tidak adanya post anggaran khusus untuk BRA yang berada di kabupaten Aceh Tengah sementara penugasan dari BRA pusat sebagai koordinasi terus bertumpuk termasuk penyelesaian lahan untuk Mantan Kombatan, Masyarakat imbas konflik Tapol dan Napol.

Dari hasil wawancara diatas dituliskan bahwa Kelemahan Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kab. Aceh Tengah adalah tidak adanya anggaran khusus yang diatur dalam Nomenklatur Kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh. Namun jika kita melihat Qanun Nomor 6 Tahun 2015 tentang BRA sebagaimana yang sudah ditetapkan bahwa BRA ini lahir sebagai bagian dari penyelesaian konflik di Aceh secara menyeluruh dan berkelanjutan. Didalamnya untuk wilayah kabupaten/kota mengajukan anggaran dan fasilitas kepada kepala daerah sebagai keterwakilannya. Mensiasati kebijakan ini Satpel Kab. Aceh Tengah mengajukan Permohonan anggaran kepada pemerintah daerah sering kali ditolak dengan alasan daerah tidak cukup anggaran untuk mendanai program tersebut dan pada akhirnya sering sekali Satuan pelaksana Badan Reintegrasi Aceh di tingkat kabupaten tidak ada kegiatan dan tidak

dapat berupaya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, termasuk upaya penyelesaian lahan atau tanah kosong yang ada di daerah tentunya untuk mensurvei lahan tersebut membutuhkan fasilitas dan anggaran yang memadai belum lagi apabila tanah tersebut dalam kawasan tanah negara atau hutan lindung maka penurunan status tanah harus dilakukan dengan koordinasi. Bagaimana mungkin ini dapat dilaksanakan tanpa adanya anggaran yang memadai.

Upaya yang dilakukan untuk melakukan perbaikan ekonomi terhadap masyarakat korban konflik, melakukan rehabilitasi dan memberikan peluang kerja dan penyediaan lahan bertujuan untuk menciptakan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat korban konflik, seperti kombatan GAM, tahanan politik dan narapidana politik.

Berdasarkan hasil temuan data dan wawancara maka dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut :

Keterbatasan Anggaran: Anggaran yang terbatas menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang optimal. Hal ini berdampak pada pemeliharaan fasilitas dan penyediaan sumber daya yang memadai.

Kurangnya Sumber Daya Manusia: Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif. Hal ini termasuk kurangnya tenaga teknis yang terampil.

Birokrasi yang Rumit: Proses birokrasi yang panjang dan kompleks seringkali memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Kurangnya Sarana dan Prasarana: Fasilitas yang tidak memadai, seperti peralatan yang usang atau tidak tersedia, menghambat kinerja dan efektivitas operasional.

Koordinasi yang Lemah: Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas.

Resistensi terhadap Perubahan: Adanya resistensi dari beberapa pihak terhadap perubahan atau inovasi baru yang diusulkan dapat menghambat perkembangan dan peningkatan kinerja.

Kebijakan Pemerintah: Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah sangat mempengaruhi kinerja BRA. Kebijakan ini mencakup alokasi anggaran, prioritas program, dan regulasi yang harus diikuti.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, Dalam pelaksanaan program Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian Aceh kinerja satuan pelaksana Badan

Reintegrasi Aceh belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan lemahnya system penganggaran yang menghambat kinerja Satuan Pelaksana Kabupaten Aceh Tengah, sehingga berimplikasi pada tidak jalannya program kerja yang telah direncanakan sesuai amanat yang tertuang dalam Ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang BRA.

Saran dalam penelitian ini adalah, harus ada kebijakan pemerintah Provinsi Aceh yang bersifat tegas terkait nominal atau persentase jumlah anggaran untuk satuan pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten Aceh tengah yang disesukan dengan Perencanaan dan Penganggaran dengan menggunakan dokumen perencanaan strategis (Renstra) yang disusun setiap lima tahun untuk menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran program.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

7. DAFTAR REFERENSI

Dowson John.1998. *Rekonsiliasi Konflik.Developmental Change.Neu York*

Fakhrurrazi,2011. ''Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh dalam proses genjatan senjata, demobilisasi, dan Reintegrasi di Aceh''. Universitas Malikussaleh. Lhoksemawe.

Galtung,1994. *Rekonsiliasi Konflik, Pustaka Jaya. Jakarta.* Gosita Arif,1993. *masalah korban dan kejahatan, Akademika Pressindo. Jakarta.* <https://bra.acehprov.go.id/pejabat-eselon/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2024. <https://bra.acehprov.go.id/struktur-organisasi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2024. <https://bra.acehprov.go.id/visi-dan-misi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reintegrasi_Aceh. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2024. <https://kkr.acehprov.go.id/struktur-organisasi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2024. Husaini Nurdin Peny, Hasan Tiro: *The Unfinished Story of Aceh, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010.*

Artikel Jurnal

Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.

Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.

Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.

Artikel Prosiding

Norsyaheera, A.W., Lailatul, F.A.H., Shahid, S.A.M., & Maon, S.N. (2016). The Relationship Between Marketing Mix and Customer Loyalty in Hijab Industry: The Mediating Effect of Customer Satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1).

Working Paper

Armand, F. (2003). Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis. *Occasional Paper Series*. Washington, DC. Retrieved from www.cmsproject.com.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Belair, A. R. (2003). Shopping for Your Self: When Marketing becomes a Social Problem. *Dissertation*. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.

Lindawati (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu Padi-Sapi di Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.

Buku Teks

Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.

Artikel Surat Kabar/Majalah

Risdwiyanto, A. (2016). Tas Kresek Berbayar, Ubah Perilaku Belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, 12.

Sumber dari internet dengan nama penulis

Chain, P. (1997). Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning's Proceedings of AARE Conference. Swinburne University. Available at: <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)

StatSoft, Inc. (1997). Electronic Statistic Textbook. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.

Catatan Kaki

Catatan kaki atau footnote tidak dapat digunakan untuk menulis referensi. Footnote hanya digunakan untuk memberikan informasi atau keterangan umum untuk memperjelas tulisan pada suatu halaman. Footnote ditulis dengan spasi tunggal dengan jenis huruf times new romans ukuran 10 pt dan diberikan penomoran, serta ditempatkan pada bagian akhir teks halaman terkait.

Penempatan Tabel**Tabel 1. Frekuensi Umur dalam tahun**

Umur (dalam tahun)	Frekuensi
15 – 19	3
20 – 24	6
25 – 29	10
30 – 34	5
35 – 39	2

Sumber: SOSHUMDIK (2022).

Penempatan Gambar



Keterangan: Gambar harus jelas dan *fix* (tidak pecah).
Sumber: SOSHUMDIK (2022).

Gambar 1. Grafik pengunjung pada suatu website

Cara penulisan referensi di dalam naskah

Penulisan sitasi (*body notes*) sesuai dengan standar American Psychological Association (APA) 6th Edition. Berikut ini adalah contoh sitasi di dalam sebuah paragraf yang mengacu pada contoh daftar referensi di atas:

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan nasional dinyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Sukmadinata, 2009)

Refleksi diartikan sebagai berpikir mengenai pengalaman sendiri dari masa lalu atau mawas diri. Refleksi dilakukan oleh siswa setelah melaksanakan berbagai kegiatan dalam bentuk pengalaman belajar. Siswa antara satu dengan lainnya melakukan analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan tindak lanjut dari pengalaman belajar yang dilalui (Rusman, 2011).